

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Polling atau jajak pendapat belakangan ini menjadi sangat populer di Indonesia. Reformasi telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan taraf demokrasi bangsa Indonesia. Perubahan demi perubahan terjadi dalam perpolitikan negara ini. Partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara menjadi sangat terasa. Semakin besar peran serta dan campur tangan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan perpolitikan suatu negara maka akan semakin tinggi pula tingkatan demokrasi bangsa tersebut di mata bangsa dan negara-negara lain di dunia. Begitupun sebaliknya, semakin minim kemampuan atau peluang masyarakat ikut serta dalam perpolitikan sebuah negara maka akan semakin rendah pula derajat demokrasi negara tersebut.

Dipertengahan tahun 2004 yang lalu tepatnya tanggal 5 Juli dan 20 September, bangsa Indonesia baru saja memantapkan dirinya sebagai negara yang demokratis dengan melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan presiden sebagai pencapaian tertinggi dari sebuah proses berpolitik suatu negara telah menjadi salah satu indikator yang amat vital dalam mengukur tingkatan derajat Demokrasi dari suatu bangsa. Meskipun tidak dapat dipungkiri kekurangan masih banyak terjadi, namun secara umum

pemilihan ini dinilai telah dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Pujianpun berdatangan dari berbagai negara di dunia.

Dalam setiap perubahan peta perpolitikan suatu negara selalu terdapat fenomena-fenomena politik baru yang tentunya sangat menarik untuk kita cermati. Tidak terkecuali dengan bangsa Indonesia. Seiring dengan maraknya perbincangan mengenai pemilihan presiden secara langsung ini, media turut ikut menyibukan dirinya dan memantapkan posisinya sebagai pembentuk opini publik yang paling strategis terutama media televisi. Sebagai salah satu pilar demokrasi media dan pers memiliki peran yang amat strategis dalam mentransformasikan setiap detil informasi kepada masyarakat. Aktualitas berita yang sedang berkembang dimasyarakat menjadi salah satu poin utama pemberitaan. Sistem baru yang terjadi dalam Pemilu 2004 telah menyedot perhatian dan harapan kepada masyarakat dalam mencari calon pemimpin yang tepat. Berbagai berita mengenai Pemilu santer disajikan termasuk hasil polling atau jajak pendapat yang menjadi salah satu fenomena baru dalam Pemilu 2004 yang lalu.<sup>1</sup> Fenomena yang sering kita kenal sebagai fenomena kuantifikasi politik.

Berdasarkan awal perkembangannya polling telah mengalami perjalanan yang sangat panjang hingga akhirnya kita mengenal arti polling atau jajak pendapat seperti sekarang ini. Berikut kami jelaskan secara singkat mengenai

---

<sup>1</sup> Muhammmad Najib, *PEMILU 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, KPU DIY, Yogyakarta, 2005 : hal 158.

bagaimana sejarah perkembangan ekspresi pendapat umum dari awal kemunculannya hingga sekarang :

### 1. Orator

Merupakan teknik ekspresi pendapat umum yang tertua. Ini terjadi ketika jumlah orang sedikit sehingga pendapat semua anggota masyarakat dapat diketahui. Di era ini hadir pertemuan kota (*limited town meeting*) yang membahas berbagai persoalan dimasyarakat. Demokrasi bersifat langsung, dimana mereka yang hadir mewakili diri mereka sendiri. Retorika/pidato adalah teknik yang paling utama untuk menyampaikan gagasan atau pendapat. Pendapat seseorang kemudian ditanggapi, didukung, ataupun disanggah oleh orang lain. Keputusan diambil secara bersama-sama. Orator dan retorika adalah kekuatan untuk memobilisasi penduduk untuk berkumpul dalam satu tempat. Kemenangan sebuah gagasan sering kali diukur dengan kemampuan atau kepandaian seseorang untuk berbicara, menyampaikan gagasan, dan membujuk orang lain. Orator dan retorika menjadi kekuatan untuk memobilisasi penduduk dalam jumlah besar. Disini pendapat umum didefinisikan sebagai keinginan kolektif rakyat yang dilandasi oleh kebajikan dan kesadaran publik.

Teknik retorika runtuh oleh sebuah perkembangan yang dramatis. Munculnya alat transportasi mengubah definisi orang tentang sebuah daerah atau wilayah serta menjadikan orang dari suatu daerah dapat berjumpa dengan

orang didaerah lainnya. Pandangan orang semakin luas dengan mengetahui ada masyarakat lain diluar dirinya dan mereka tidak sendirian. Kemudian didukung dengan munculnya alat cetak dan teknologi komunikasi yang lain. Dalam era retorika, gagasan disampaikan secara langsung dan yang dibicarakan adalah sesuatu yang amat konkret. Dalam era cetakan diskusi menjadi terbuka bahkan untuk persoalan yang abstrak menjadi sangat mungkin untuk disampaikan. Pendapat umum tidak lagi muncul lewat pertemuan-pertemuan, tetapi pendapat umum dapat dikenali lewat berita dikoran, buku, dan barang cetakan lain.

## **2. Kerumunan massa**

Meskipun lahirnya cetakan membawa perubahan besar, tetapi problemnya adalah belum semua orang dapat membaca dan mempunyai akses terhadap koran atau buku. Maka di akhir abad 17-an kerumunan massa masih merupakan suatu metode yang dominan. Di sini aktor-aktor politik masih mempergunakan kerumunan massa sebagai suatu metode untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh publik. Para aktor politik menggunakan kerumunan massa untuk empat alasan. Pertama, mereka mendapat dukungan dari perseorangan dan khalayak ramai. Kedua, mereka mengharapkan efek berantai dimana seseorang dari suatu khalayak mengajak orang lainnya untuk memberikan suara. Mereka juga ingin membuat kesan tampak populer bagi mereka yang berada diluar khalayak ramai tersebut. Ketiga, khalayak ramai

memberikan umpan balik, memberikan mereka kesempatan untuk mengerti bagaimana mereka seharusnya bertindak. Keempat, suatu khalayak “menciptakan” peristiwa politis agar koran tertarik untuk meliputnya secara lengkap dan mengungkapkan tanggapan-tanggapan yang menguntungkan.

Di akhir abad 17 juga berkembang bentuk ekspresi pendapat dalam wujud petisi. Di Inggris misalnya, petisi diajukan oleh parlemen dengan berbagai topik persoalan. Petisi itu tidak datang dari parlemen tetapi dari kerumunan rakyat.

### **3. Ruang diskusi**

Meskipun pendapat umum mulai dikenal sejak pertemuan kota, tetapi revolusi pendapat umum dalam pengertian modern baru dikenal pada abad 18. karena pada era ini suara rakyat mulai dianggap sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan publik. Cukup jelas hal ini akibat dari gagasan para pemikir pada periode 1650-1800 yang mengajukan gagasan pembatasan kekuasaan. Sebelum itu apa yang dipikirkan masyarakat tidak banyak digubris, masyarakat tidak tahu cara bagaimana suara atau pendapatnya dapat didengarkan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan. Dalam abad ke 18 inilah muncul ide bahwa suara rakyat memegang kekuasaan, dimana pemerintah didukung oleh suara rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan.

Di abad 18, pendapat umum ini didiskusiakan dalam berbagai ruang diskusi dan pertemuan. Di perancis tempat itu disebut *salon*. Sedangkan di Inggris disebut *coffehouse*. Berbagai ide tentang agama, politik, sosial, dan berbagai isu masyarakat dibicarakan di sini. Pendapat umum dapat diketahui di tempat-tempat tersebut, sebagai arena dari diskursus publik. Ruang diskusi itu terutama adalah tempat pertemuan yang mengajukan gagasan-gagasan kritis dari para elit intelektual. Banyak ilmuwan, pemikir, penulis, membentuk perkumpulan semacam untuk mendiskusikan berbagai ide. Pendapat Rousseau, Diderot, dan filosof lainnya digunakan sebagai acuan diskusi. Orang yang mempunyai kemampuan membaca tetapi tidak memiliki uang mempunyai kesempatan untuk bergaul dengan kaum bangsawan. Filosof dan penulis diuntungkan dengan partisipasinya dalam *salon*.

Munculnya *salon* merupakan bagian penting dari sejarah pendapat umum. Dialog yang keluar dari ruang-ruang diskusi ini mempengaruhi pendapat umum di perancis. *Salon* juga merupakan forum untuk mengukur pendapat umum, karena itu *salon* menjadi sarana bagi rezim untuk mengetahui pendapat umum atau pikiran publik. Pertemuan dan pembicaraan dalam berbagai ruang pertemuan ini selalu dipantau oleh raja. *Salon* dipercaya dapat dapat menggambarkan pendapat dari seluruh warga perancis. Selain *salon* di Inggris juga terdapat *coffehouse* yang memiliki fungsi sebagaimana *salon* di Perancis. Berbeda dengan era dewan kota, *coffehouse* dan *salon*

tidaklah dimaksudkan untuk membuat kebijakan tetapi lebih difungsikan untuk membahas ide-ide dan gagasan. Pendapat yang dibicarakan ini kemudian dimuat melalui surat kabar pada keesokan harinya. *Salon* dan *coffehouse* ini kemudian dianggap sebagai awal gagasan diakuinya pendapat umum dalam pengertian modern.

#### 4. Gerakan massa

Apa yang dibicarakan dalam *coffehouse* atau *salon* mengkristal dan kemudian mengilhami lahirnya revolusi menentang kekuasaan monarki. Kemudian pendapat umum diekspresikan lewat parade anti pemerintah, gambar kartun politik, demonstrasi yang menyuarakan pembatasan kekuasaan. Akhir abad ke 18 adalah era yang penuh dengan gerakan revolusi, dimana pendapat umum diekspresikan lewat berbagai aksi perlawanan terhadap pemerintah dan kemudian melahirkan berbagai aksi pemogokan seperti yang dilakukan kaum buruh pada awal abad 19.

Perkembangan lain yang juga patut dicatat adalah pada tahun 1890-an, media massa mulai muncul sebagai menjadi kekuatan besar terutama diamerika. Media berkembang menjadi alat yang otonom untuk mengekspresikan pendapat umum.

## 5. Pemilu

Di awal abad ke-19, suara masyarakat telah diterima sebagai bagian penting dalam politik. Di era ini muncul gagasan untuk memasukkan suara rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang disalurkan melalui teknik Pemilu atau pemilihan umum. Pemilu adalah puncak dari ekspresi pendapat umum karena Pemilu pada dasarnya menghargai pendapat pribadi, suara setiap orang dihargai dan secara politik.

## 6. Straw vote

Pemikiran lebih lanjut mengenai pendapat umum terjadi pada awal abad 20-an. Mahalnya biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemilu menjadikan pengukuran pendapat masyarakat tidak dapat dilakukan dengan lebih intensif. Namun berbagai macam isu yang berdatangan silih berganti memaksa untuk melahirkan ide penilaian pendapat umum yang lebih efektif. Pada masa inilah muncul metode pengumpulan pendapat umum melalui straw vote. Terdapat tiga macam metode dalam penyelenggaraan straw vote, yaitu : pertama, surat suara dicetak melalui surat kabar dan kemudian pembaca diminta untuk mengirimkan surat suara yang telah diisi tersebut kepada penyelenggara straw vote. Kedua, surat suara dikirimkan ke alamat melalui daftar yang dimiliki kantor pos atau melalui daftar kepemilikan mobil, kemudian masyarakat yang menerima surat suara diminta untuk mengisi dan mengirimkannya kembali kepada penyelenggara. Ketiga, yang paling sering

dilakukan pada waktu itu adalah dengan menyebarkan surat suara ditempat-tempat umum dan keramaian seperti pusat perdagangan.

Permasalahan yang timbul dalam metode ini adalah belum berkembangnya prinsip-prinsip penentuan sampel sehingga penyelenggara selalu beranggapan bahwa, semakin besar jumlah responden maka akan semakin baik pula hasil penghitungan pendapat umum tersebut. Dan sering kali hasil yang diperoleh tidak dapat mewakili pendapat masyarakat yang sebenarnya.

## **7. Polling**

Pada perkembangan selanjutnya prinsip probabilitas mulai diterapkan. Penerapan prinsip penarikan sampel secara ilmiah dengan menggunakan metode penelitian ilmu sosial mulai dilakukan dalam penghitungan pendapat umum. Penggunaan metode penarikan sampel yang benar dapat mewakili pendapat jutaan orang hanya melalui beberapa ribu orang. Perkembangan yang telah memakan waktu yang panjang ini akhirnya melahirkan standarisasi penghitungan yang mapan dan stabil hingga menjadikan polling sebagai metode terpercaya dalam mengukur pendapat umum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Eriyanto, *Metodologi Polling*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999 : hal 6 – 13

**Tabel 1.1**  
**Sejarah Ekspresi Pengukuran Pendapat Umum**

No	Teknik Ekspresi	Periode Kemunculan	Cara Publik Menyampaikan Pendapat Umum	Cara Pemerintah Mengetahui Pendapat Umum
1	Retorika/orator	Abad 5 SM	Berdebat, mengajukan gagasan	Pertemuan warga kota
2	Cetakan	Abad 16	Menyampaikan gagasan lewat buku atau barang tercetak	Buku, barang cetakan, selebaran
3	Kerumunan	Abad 17	Kampanye, menyampaikan gagasan ditengah massa	Tempat kampanye
4	Petisi	Akhir abad 17	Mengajukan petisi atau usul	Parlemen
5	Salon	Akhir abad 17	Diskusi dengan orang lain	Hadir di salon
6	Coffehouse	Abad 18	Diskusi dengan orang lain	Hadir di coffehouse
7	Gerakan Revolusi	Akhir abad 18	Demostrasi, menumbangkan kekuasaan, kudeta	Aksi massa
8	Pemogokan	Abad19	Boikot, mogok	Pemogokan
9	Pemilu	Abad 19	Ikut sebagai pemilih dalam Pemilu	Hasil Pemilu
10	Suratkabar Modern	Pertengahan Abad 19	Menulis di Media massa	Membaca suratkabar
11	Surat untuk pejabat Publik	Pertengahan Abad 19	Mengajukan usul dan kritik terhadap pejabat	Surat protes
12	Straw Vote	1990-an	Mengajukan pendapat	Hasil straw

Sambungan Tabel 1.1 : Sejarah Ekspresi Pengukuran Pendapat Umum

No	Teknik Ekspresi	Periode Kemunculan	Cara Publik Menyampaikan Pendapat Umum	Cara Pemerintah Mengetahui Pendapat Umum
13	Perencanaan Agenda Massa (Politik)	1920-1930-an	kepada straw vote Liputan Media massa	vote Tulisan di Media
14	Sampel Survei/ Polling	1930-an	Responden sampel	Hasil polling

Diambil dari Susan Herbst, *numbered Voices : How Oppinion Polling has shaped American Politics*, Chicago, University of Chicago Press, 1995, hlm. 48

Dalam konteks pemilu presiden setidaknya terdapat enam lembaga jajak pendapat yang secara periodik melaksanakan pollingnya (LSI, IFES, LP3ES, LKaDe, SSS dan LSPEU). Enam lembaga ini telah melaksanakan polling dengan metode survei ilmiah. Belum lagi lembaga-lembaga jajak pendapat yang menggunakan sistem *Short Message Services* (SMS) ataupun via telepon. Hasil yang beraneka ragam dan mengejutkan muncul dalam berbagai polling ini.

Berdasarkan hasil jajak pendapat melalui pesan pendek yang dilaksanakan SCTV sejak tanggal 26 Mei 2004, tercatat 40 % responden memilih Amien-Siswono, 37,8 % memilih SBY-Kalla, 12,7 % memilih Megawati-Hasyim Muzadi, 7,8 % memilih Wiranto-Wahid, dan 1,4 % memilih Hamzah Haz-Agum Gumelar.<sup>3</sup>

Berikut data perolehan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan beberapa lembaga jajak pendapat (LJP) berdasarkan metode survei ilmiah.

<sup>3</sup> [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com). 1 Juli 2004, diakses tanggal 29 November 2006

**Tabel 1.2**  
**Popularitas Capres Pada Pemilu Presiden Putaran I**  
**Versi Jajak Pendapat International Foundation For Election System (IFES)**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Persentase
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	14,2 %
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	9,9 %
3.	Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	9,1 %
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	43,5 %
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	5,9 %
6.	Tidak Jawab	17,4 %

Sumber : [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com). Survei capres periode Juni 2004,  
 Diakses tanggal 29 November 2006

**Tabel 1.3**  
**Popularitas Capres Pada Pemilu Presiden Putaran II**  
**Versi Jajak Pendapat International Foundation For Election System (IFES)**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Persentase
1.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	29,3 %
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	61,2 %
3.	Tidak Jawab	9,5 %

Sumber : [www.sriwijayapos.com](http://www.sriwijayapos.com). Kamis 14 september 2004  
 Polling yang dilaksanakan pada tanggal 2-9 september 2004  
 Diakses tanggal 29 November 2006

**Tabel 1.4**  
**Popularitas Capres Pada Pemilu Presiden Putaran I**  
**Versi Jajak Pendapat Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS)**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Persentase
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	10,56 %
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	13,78 %
3.	Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	19,70 %
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	46,64 %
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	2,34 %
6.	Tidak Jawab	6,98 %

Sumber : [www.cps-sss.org](http://www.cps-sss.org). Hasil Polling Untuk periode Juni 2004.  
 Diakses tanggal 29 November 2006

**Tabel 1.5**  
**Popularitas Capres Pada Pemilu Presiden Putaran II**  
**Versi Jajak Pendapat Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS)**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Persentase
1.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	34,68 %
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	41,30 %
3.	Tidak Jawab	24,02 %

Sumber : [www.cps-sss.org](http://www.cps-sss.org). Hasil Polling yang dilaksanakan pada tanggal 14-26 Agustus 2004.  
Diakses tanggal 29 November 2006

**Tabel 1.6**  
**Popularitas Capres Pada Pemilu Presiden Putaran I**  
**Versi Jajak Pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI)**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Persentase
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	14,9 %
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	20,3 %
3.	Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	13,6 %
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	43,5 %
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	2,3 %
6.	Tidak Jawab	5,4 %

Sumber : [www.lp3es.or.id](http://www.lp3es.or.id). Perbandingan hasil survei Pra-Pemilu, 27 Juli 2004.  
Diakses tanggal 29 November 2006

**Tabel 1.7**  
**Popularitas Capres Pada Pemilu Presiden Putaran II**  
**Versi Jajak Pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI)**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Persentase
1.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	32,7 %
2.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	61,3 %
3.	Tidak Jawab	6,0 %

Sumber : [www.sriwijayapos.com](http://www.sriwijayapos.com). Kamis, 14 September 2004  
Polling yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 September 2004  
Diakses tanggal 29 November 2006

Dan sebagai pembandingan berikut adalah data hasil penghitungan suara pada Pilpres putaran pertama 5 Juli 2004 dan Pilpres putaran kedua 20 September 2004.

**Tabel 1.8**  
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara**  
**Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Jumlah	%
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22,154 %
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	31.569.104	26,605 %
3.	Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14,658 %
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,574 %
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	3.569.861	3,009 %
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>118.656.868</b>	

Sumber : Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, hal 436

**Tabel 1.9**  
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara**  
**Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua**

No	Nama Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden	Jumlah	%
1.	H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid	-	-
2.	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi	44.990.704	39,38 %
3.	Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	-	-
4.	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60,62 %
5.	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc	-	-
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>114.257.054</b>	

Sumber : Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, hal 438

Berdasarkan data tersebut, tingkat akurasi dan presisi yang lumayan baik dapat kita lihat pada polling atau jajak pendapat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga jajak pendapat dengan menggunakan metode survei ilmiah. Berbeda dengan hasil yang dilakukan berdasarkan SMS ataupun telepon, ternyata hasil yang diperoleh masih jauh dari kenyataan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sampel yang diperoleh dari kepemilikan telepon genggam belum dapat mewakili populasi masyarakat Indonesia seluruhnya.

Meskipun masih memiliki tingkat error yang cukup tinggi tetapi LJP (Lembaga Jajak Pendapat) dengan menggunakan metode survei ilmiah telah berhasil memprediksi pemenang dalam Pemilu presiden 2004 dengan urutan yang tepat. Hal menarik bagi penulis untuk mengambil salah satu LJP yang menerapkan metode survei ilmiah sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

Dari sejumlah LJP yang ada di Indonesia, LSI (Lembaga Survei Indonesia) merupakan salah satu lembaga yang rutin menyelenggarakan polling dalam mengukur pendapat masyarakat terhadap berbagai isu dan masalah baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam menyelenggarakan jajak pendapat pra-Pemilu legislatif yang lalu LSI telah berhasil mencapai tingkat error paling rendah yaitu sebesar 1% sehingga menjadikan lembaga ini sebagai barometer dan lembaga yang paling terpercaya bagi masyarakat dalam hal pengukuran pendapat publik.<sup>4</sup> Hal ini pulalah yang menjadikan penulis memilih LSI (Lembaga Survei Indonesia) sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Sulfikar Amir, *Demokrasi dan Kuantifikasi Politik*, Kompas edisi Selasa, 29 Juni 2004.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan yang saya uraikan dalam latar belakang, maka saya menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana metodologi jajak pendapat yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam memprediksi pemenang dalam Pilpres 2004 lalu ?”**

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :
  - a. Mengetahui metodologi yang digunakan LSI dalam pelaksanaan jajak pendapat.
  - b. Mengetahui tingkat akurasi dan presisi jajak pendapat yang telah dilaksanakan LSI dalam Pemilu Presiden 2004.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi masyarakat mengenai proses pelaksanaan jajak pendapat.
  - b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dalam menentukan hasil jajak pendapat seperti apa yang dapat dipercaya.

## D. KERANGKA TEORI

Kerangka dasar teori yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga aktifitas ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

### 1. Polling (Jajak Pendapat)

#### 1.1 Pengertian Polling (Jajak Pendapat)

Polling atau jajak pendapat adalah salah satu cara untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai suatu masalah yang sedang terjadi.

Eriyanto mengungkapkan ;

“Polling sering didefinisikan sebagai suatu penelitian (survei) dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai pendapatnya terhadap suatu isu/masalah tertentu. Polling secara metodologis adalah sebuah teknik untuk menyelidiki apa yang dipikirkan orang terhadap isu/masalah yang muncul. Polling adalah suatu metode untuk mengetahui pendapat umum. Polling merupakan ekspresi sekaligus metode untuk mengetahui pendapat umum terhadap suatu isu”<sup>5</sup>

Menurut Cellinda C.Lake ;

“Polling adalah cara sistematis, ilmiah, dan terpercaya, mengumpulkan informasi dari sampel orang yang digunakan untuk mengeneralisasikan pada kelompok atau populasi yang lebih luar dari mana sampel itu diambil. Polling tidak didesain untuk menyelidiki atau mengidentifikasi individu – untuk keperluan ini, lebih murah dan efisien dengan cara lain seperti penyelidikan telepon. Kesalahan menentukan tujuan polling ini dapat mengakibatkan bias informasi yang anda dapat. Polling juga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan banyak individu secara mendalam. Untuk keperluan ini studi kasus lebih murah dan efisien. Polling tidak bermaksud untuk menggambarkan individu atau masalah secara mendalam – studi

<sup>5</sup> Eriyanto, *Metodologi Polling*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999 : hal 3

kasus adalah cara yang lebih efisien untuk itu. Polling adalah suatu pengukuran pada satu waktu untuk mengetahui sikap, perilaku, kepercayaan, dan hubungan diantara semua parameter. Lewat generaliasasi, hasilnya kemudian dapat diterapkan untuk masyarakat lebih luas.<sup>6</sup>

Menurut B.N. Marbun, SH polling adalah :

“Teknik mengukur pendapat yang dianut oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat tertentu. Penyelidikan didasarkan pada dalil atau metode statistik tertentu yang menunjukkan bahwa golongan tertentu yang dengan cermat telah ditetapkan dapat dengan tepat mencerminkan pendapat seluruh golongan masyarakat. Ketepatan ini tergantung pada ketelitian bagaimana golongan dipilih, dan luas sempitnya pilihan.”<sup>7</sup>

Dengan kata lain polling atau jajak pendapat dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengukur atau mengetahui pendapat masyarakat atau opini publik melalui survei atau penelitian pada beberapa individu atau kelompok masyarakat atau sampel tertentu berdasarkan kaedah kaedah atau metode tertentu agar tercapai hasil yang mendekati keadaan yang sebenarnya dan dapat mewakili pendapat masyarakat seluruhnya.

## 1.2 Perkembangan Metode Polling

Pengukuran pendapat umum mempunyai sejarah panjang sampai kepada taraf kestabilannya. Beberapa perkembangan penting dari sejarah polling adalah sebagai berikut :

<sup>6</sup> Cellinda C.Lake and Pat Callbeck harper, *Publik Opinion Polling : A Handbook for public interest and citizen advocacy Groups*, Washington DC, Islandia Press, 1987 : hal 5

<sup>7</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996 : hal 521

### 1.2.1 Straw Vote

Pada abad 19 sejarah polling dimulai dengan adanya pemungutan suara tak resmi (*straw poll*) yang dikembangkan oleh para wartawan surat kabar. Pada awal perkembangannya ditahun 1824, polling hanya digunakan dalam mengukur dukungan masyarakat terhadap calon presiden yang akan dipilih. Tercatat pada tanggal 24 Juli, sebuah surat kabar *Harrisburg Pennsylvanian* telah melaksanakan pemilihan tak resmi yang dilaksanakan tanpa diskriminasi partai melaporkan bahwa Jackson merupakan calon presiden pilihan rakyat melebihi John Quincy Adams, Henry Clay, dan William H Crawford. Menjelang akhir abad 19, surat kabar-surat kabar dan majalah di Amerika mulai secara teratur meramalkan pemilihan-pemilihan lokal di berbagai negara bagian maupun nasional.

Dalam *straw vote* proses pengambilan suara belum menggunakan prinsip ilmiah terutama probabilitas sehingga mereka yang diwawancarai tidak dapat dikatakan mewakili populasi seluruh masyarakat. Staw vote dilakukan dengan mendistribusikan surat suara di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan tempat rekreasi dan diisi oleh mereka yang bersedia untuk mengisinya dan kemudian mengembalikannya ke kotak suara yang telah disediakan. *New York Daily News* merupakan

salah satu surat kabar yang terkenal sering melaksanakan *straw vote* ini sejak tahun 1928. Selain mendatangi responden secara langsung, *straw vote* juga bisa dilakukan dengan mengirimkan surat suara melalui pos, mengisi kupon surat suara yang terdapat pada surat kabar dan dikirimkan kembali kepada penerbitnya, atau dapat juga dengan menghubungi nomor telepon tertentu.

### 1.2.2 Poll Literary Digest

Pada era *straw vote* polling yang paling terkenal ialah yang dilakukan majalah *Literary Digest* oleh karena perencanaan yang baik dan jumlah responden yang besar. Di tahun 1924 majalah ini mengirimkan 16,5 juta surat suara kepada pemilik telepon dan mobil di Amerika Serikat. Meskipun belum menggunakan metode penelitian survei secara ilmiah, *Literary Digest* telah berhasil memprediksi dengan tepat Pemilu tahun 1924, 1928, dan 1932.

Ditahun 1936 *Literary Digest* melakukan kesalahan fatal saat memprediksi calon presiden antara M.Landon (Republik) dan Franklin D. Roosevelt (Demokrat). Dalam hasil pollingnya Alfred M.Landon diprediksi akan memenangkan Pemilu dengan 57 % suara sedangkan Roosevelt hanya memperoleh 43 % suara, namun ternyata Roosevelt lah yang memenangkan Pemilu dengan 62,5 % suara sedangkan Alfred M.Landon hanya memperoleh 38,5 %

suara. Kesalahan terbesar *Literary Digest* adalah pada pemilihan sampel mereka yang berdasarkan pada daftar kepemilikan telepon dan mobil. Tahun 1936 adalah masa resesi ekonomi bagi Amerika Serikat. Telepon dan mobil hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sehingga mereka yang menjadi responden dalam survei *Literary Digest* hanyalah sebatas masyarakat Amerika yang hidup dalam tingkatan ekonomi yang baik dengan jumlah yang relatif sedikit apabila dibandingkan dengan masyarakat yang berada pada tingkatan ekonomi lemah. Hal ini menjadikan responden atau sampel tidak dapat mewakili seluruh populasi yang ada di Amerika Serikat.

### 1.2.3 Pemakaian Quota Sampling

Kegagalan ini memacu untuk melahirkan pendekatan lain yang lebih metodologis dan ilmiah sehingga dapat memperoleh hasil polling yang dapat dipertanggungjawabkan. Muncul nama-nama baru dalam penelitian survei ilmiah seperti Elmo Roper, Paul Cherington, dan salah satunya yang terkenal ialah George Gallup pendiri *American Institute of Public Opinion*.

Meskipun masih memiliki tingkat kesalahan (error) yang tinggi namun mereka telah berhasil memprediksi secara tepat kemenangan Roosevelt pada Pemilu 1936. Gallup dan organisasi polling ini menerapkan metode sampel yang lebih menjamin

tercapainya representasi dengan menghitung proporsi untuk Demokrat atau Republik. Meskipun belum dapat menerapkan teknik probably sampling, namun Gallup telah dapat menerapkan Quota Sampling yang terbukti dapat memperkecil tingkat kesalahan atau error dalam polling mereka. Namun tingkat kesalahan yang lebih baik ini ternyata masih dapat menghasilkan kesalahan prediksi seperti pada pemilu 1948 ketika Gallup memprediksikan kemenangan Thomas Dawey atas Harry S. Truman yang ternyata adalah sebaliknya.

#### 1.2.4 Sampel Probabilitas

Kesalahan yang terjadi pada Pemilu 1948 ini melahirkan banyak perubahan dalam metodologi polling. Penyelenggara Polling mulai menerapkan prinsip ilmiah dalam penarikan sampel yakni sampling probabilitas. Dalam sampling probabilitas sampel yang diambil menggunakan teori peluang sehingga memungkinkan bagi siapa saja untuk dapat menjadi responden dan dapat mewakili populasi secara menyeluruh. Teknik sampling inilah yang kemudian terus dikembangkan dan digunakan hingga saat sekarang ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Eriyanto, *Metodologi Polling*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999 : hal 14 – 16.

### 1.3 Karakteristik Polling

1. Polling atau jajak pendapat adalah suatu cara mengumpulkan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan prosedur ilmiah. Hal inilah yang kemudian membedakannya dengan kerja pengumpulan pendapat lain seperti wawancara, seminar, protes, pengerahan massa dan sebagainya yang dilakukan tanpa teknik dan prosedur ilmiah.
2. Metode pengumpulan pendapat menggunakan teknik sampling untuk menggambarkan sikap atau pendapat populasi yang dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar. Disarankan dan umumnya menggunakan prinsip probabilitas dalam penarikan sampelnya agar dapat mempresentasikan populasi sesungguhnya.
3. Polling hanya dapat digunakan untuk menggambarkan sikap dan perilaku. Dan hanya sebatas mengetahui pikiran publik terhadap suatu masalah serta menggambarkan preferensi atau intensitas terhadap pilihan pendapat.
4. polling digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik secara akurat. Akumulasi data yang diperoleh semata-mata untuk deskripsi dan tidak berusaha menguji hipotesis atau konsep. Dengan kata lain polling dapat juga disebut sebagai penerapan praktis dari metode survei oleh karena sifat kesederhanaannya demi memperoleh hasil yang cepat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> ibid, hal 75-77

## **1.4 Tahapan Pelaksanaan Polling**

### **1.4.1 Mengidentifikasi tujuan polling**

Langkah pertama dalam melaksanakan polling ialah dengan menentukan secara tepat tujuan polling yang akan dibuat. Tujuan yang kita rumuskan ini akan menentukan semua instrument polling yang digunakan seperti target populasi, tipe informasi, waktu wawancara, dan metode wawancara yang dipakai.

### **1.4.2 Populasi polling**

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan polling ini adalah menentukan populasi. Populasi polling ditentukan oleh topik dan tujuan polling yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam melaksanakan polling seputar pemilu, maka populasi yang relevan dalam polling ini adalah para calon pemilih dalam pemilu tersebut.

### **1.4.3 Menentukan teknik penarikan sampel**

Salah satu tahapan yang amat vital dalam menentukan hasil polling adalah dalam menentukan teknik penarikan sampel. Pertimbangan yang digunakan dalam teknik penarikan sampel diantaranya ada tidaknya ketersediaan kerangka sampel. Apabila kerangka sampel ini telah tersedia kita dapat memutuskan menggunakan sampel acak sederhana atau sistematis. Tetapi

apabila kerangka sampel yang memuat anggota populasi itu tidak tersedia, kita dapat menggunakan sampel kluster – jika menyusun kerangka sampel itu membutuhkan waktu lama dan dana yang besar. Pertimbangan lain adalah apakah populasi itu cukup menyebar atau mengumpul. Jika populasi menyebar maka lebih efektif jika menggunakan sampel kluster, tapi jika populasi mengumpul, sampel acak sederhana dapat digunakan. Diluar pertimbangan itu peneliti juga perlu mempertimbangkan dana, waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia.

#### **1.4.4 Menentukan tipe informasi**

Dalam polling cara untuk mengetahui pendapat atau pikiran orang lain adalah dengan bertanya bukan dengan observasi ataupun partisipasi. Dengan suatu daftar pertanyaan atau kuisisioner kita mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka rasakan terhadap suatu isu atau permasalahan yang sedang aktual. Adapun fungsi kuisisioner itu sendiri ialah sebagai alat dimana data itu diperoleh baik data mengenai umur, sikap, dan pendapat termasuk mengukur pendapat seseorang melalui instrumen-instrumen tertentu. Ada beberapa hal yang dapat diukur dalam polling, yaitu mengukur sikap, kepercayaan, pengetahuan, dan perilaku. Dalam menentukan tipe pertanyaan yang akan dipakai, terlebih dahulu kita harus menetapkan tipe informasi yang kita perlukan apakah berupapengukuran sikap, kepercayaan, pengetahuan, atautkah perilaku.

#### **1.4.5 Waktu wawancara**

Desain polling juga harus mempertimbangkan apakah polling dibuat untuk sekali waktu ataukah rangkai waktu. Polling dapat dipandang sebagai pendapat yang disampaikan seseorang pada waktu wawancara dilakukan dalam mengeksplorasi atau mendeskripsikan informasi. Polling juga dapat dipandang sebagai bagian dari survei longitudinal yang mengumpulkan beberapa individu dari satu waktu ke waktu lain. Polling seperti ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sikap atau kecenderungan masyarakat dalam hal tertentu.

#### **1.4.6 Menentukan metode wawancara**

Metode wawancara ditentukan sebelum polling dijalankan apakah menggunakan metode wawancara langsung, lewat surat, ataupun lewat telepon. Dalam tahap perencanaan hal yang perlu diperhatikan diantaranya topik polling itu sendiri sehingga dapat diperkirakan apakah tema polling tersebut membutuhkan kecepatan untuk dipublikasikan atau tidak. Apabila tema polling tersebut membutuhkan publikasi yang cepat maka metode wawancara juga harus cepat seperti via telepon agar hasilnya dapat segera dipublikasikan. Pertimbangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah seberapa dalam informasi yang dibutuhkan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka metode wawancara langsung adalah yang terbaik, namun apabila hanya ingin mengetahui pendapat masyarakat maka wawancara lewat telepon sudah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan.

Pertimbangan lain yang penting untuk diperhatikan dalam menentukan metode wawancara ini ialah karakteristik target populasi. Seperti dalam polling mengenai pemilu misalnya, wawancara lewat telepon harus dihindari mengingat target populasinya yang tersebar luas dan tidak seluruh populasi tersebut memiliki sambungan telepon sehingga wawancara lewat telepon tidak akan mampu mewakili populasi sebenarnya yang lebih luas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 78 – 82.

## 2. Pemilu

### 2.1 Pengertian Pemilu

Secara sederhana Pemilu dapat diartikan sebagai suatu atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>11</sup>

Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dijelaskan makna permusyawaratan (rakyat) bahwa tiap-tiap keputusan negara harus diambil setelah dilakukan perundingan terlebih dahulu. Persetujuan dan perundingan ini dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil-wakil yang duduk di DPR ini merupakan hasil pilihan rakyat melalui cara-cara tertentu yang disebut pemilihan umum.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2003, dijelaskan :

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>11</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984 : hal 81

Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berurut-urut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN
6. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
7. Penduduk adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau luar negeri.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota DPD

10. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.
11. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
12. Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
13. Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
14. Tahap Penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2003*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2003 : hal 204 – 206.

Menurut Suryountoro, Pemilihan Umum adalah :

“ Pemilihan Umum (selanjutnya akan disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk didalam badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Tingkat II ( DPRD I dan DPRD II). ”<sup>13</sup>

Ali Murtopo Mengungkapkan pengertian Pemilihan Umum sebagai berikut :

“ Pada hakekatnya Pemilu ialah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara. ”<sup>14</sup>

Dengan demikian Pemilu dapat diartikan sebagai sarana menjalankan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengakuan terhadap hak warga negara untuk dipilih dan memilih wakil-wakilnya untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara.

<sup>13</sup> Suryountoro, *Pokok-pokok Pengertian Pemilu*, Bina Ilmu, Surabaya, 1976 : hal 3.

<sup>14</sup> Ali Murtopo, *Strategi politik Nasional*, Jakarta, 1974 : hal 61.

## 2.2 Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas Pemilu adalah sebagai berikut :

### a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

### b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang berifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

### c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Undang-Undang No.12 TH 2003 Tentang Pemilu dan Penjelasmnya*, Media Grafika Utama, Sleman, 2003 : hal 80 – 81.

### 3. Pemilu Presiden 2004

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan semangat reformasi 1998-1999, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan secara demokratis dan beradab dengan perluasan partisipasi rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sesuai dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ini memberikan perluasan hak politik masyarakat. Dengan Pemilihan secara langsung ini diharapkan akan melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat yang kemudian dapat memperkuat legitimasi pemimpin tersebut oleh karena mandat atas kekuasaannya diperoleh secara langsung dari rakyat.<sup>16</sup>

Pemilu Presiden menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah :

---

<sup>16</sup> Drs. Muhammmad Najib, *PEMILU 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, KPU DIY, Yogyakarta, 2005 : hal 27

“ Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. “<sup>17</sup>

Kemudian diperjelas dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 :

“ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. “<sup>18</sup>

Dalam Pemilu presiden 2004, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Parpol ataupun gabungan Parpol yang berhak mengajukan calonnya apabila memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu Legislatif sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu Legislatif tahun 2004.

Penentuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka oleh partai berdasarkan mekanisme internal Partai Politik tersebut. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengajukan satu pasangan calon presiden dan

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, *Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, CV. Karina Anfaka Perdana, Surabaya, 2003 : hal 2.

<sup>18</sup> *Ibid*, Op. cit, hal 2.

Wakil Presiden berdasarkan mekanisme internal partai maupun hasil musyawarah gabungan Parpol tersebut. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh satu partai sehingga apabila terdapat dua partai berbeda mengajukan calon yang sama maka sebaiknya Parpol tersebut melakukan koalisi.<sup>19</sup>

Pasangan calon Presiden yang keluar sebagai pemenang pada pemilihan tahap pertama 5 Juli 2004 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden 2004 dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dan jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persyaratan tersebut maka pasangan calon yang memiliki jumlah suara terbanyak pertama dan kedua akan mengikuti pemilihan kembali pada tahap kedua yang diselenggarakan pada 20 september 2004.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Drs. Muhammmad Najib, *PEMILU 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*, KPU DIY, Yogyakarta, 2005 : hal 27-28.

<sup>20</sup> Ibid hal 28-29.

## **E. DEFINISI KONSEP**

Definisi konsep adalah pembatasan pengertian yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman atau dengan kata lain definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi hal-hal yang perlu diamati.

### **1) Polling (Jajak Pendapat)**

Polling atau jajak pendapat adalah suatu cara untuk mengukur atau mengetahui pendapat masyarakat atau opini publik melalui survei atau penelitian pada beberapa individu atau kelompok masyarakat atau sampel tertentu berdasarkan metode tertentu agar tercapai hasil yang mendekati keadaan yang sebenarnya dan dapat mewakili pendapat masyarakat seluruhnya.

### **2) Pemilu**

Pemilu dapat diartikan sebagai sarana menjalankan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengakuan terhadap hak warga negara untuk dipilih dan memilih wakil-wakilnya untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksploratif yang merupakan tingkat penelitian awal dan sifatnya penelitian penjelajahan. Dalam penelitian eksploratif ini peneliti sama sekali belum mengetahui apa yang terjadi, peneliti megawali penelitiannya tanpa prasangka ataupun pertanyaan yang mengarah karena sasaran penelitian sangat asing bagi peneliti sehingga peneliti harus memiliki sikap terbuka terhadap segala informasi yang ditemui.<sup>21</sup>

### **2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah LSI (Lembaga Survei Indonesia).

### **3. Data dan Sumber Data**

Data adalah segala keterangan dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan dengan objek penelitian dan data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (data tidak langsung) melalui buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002 : hal 110.

<sup>22</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987 : hal 221.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 1995 : hal 84

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara berupa tanya jawab kepada pihak yang berhubungan dengan objek penelitian dalam hal ini pegawai atau peneliti LSI. Data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dan studi perpustakaan, yaitu suatu cara mencari data-data dari dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan judul seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>24</sup> Disamping itu juga akan dilengkapi dengan berbagai data ataupun keterangan yang diperoleh melalui internet maupun jurnal.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan tahap akhir dari penelitian. Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.<sup>25</sup>

Sesuai dengan jenis penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan datanya maka analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisa ini maka data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dianalisis dengan menggunakan angka-angka melainkan diinterpretasikan dengan menggambarkan hasil perolehan data tersebut berdasarkan tujuan penelitian.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989 : hal 131.

<sup>25</sup> Patton dalam Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 1988 : hal 103